
**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DAN
DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA
GARING KABUPATEN GOWA)**

Magfira Ulfiah¹, Muhammad Nasrun², Amir³, Nuraeni⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: magfiraulfiah04@gmail.com¹, nraeninasir@gmail.com⁴

Abstract

This study aims to analyze the village fund management policy and its impact on the local community in Garing Village, Gowa Regency. The method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials, community leaders, and program beneficiaries. The results show that the village fund management policy has been implemented by prioritizing transparency and community participation, although the level of public involvement still needs to be improved. The village fund has had a positive impact on infrastructure development and economic empowerment; however, the benefits have not been evenly distributed. Several obstacles were identified, including delays in fund disbursement, low capacity of village officials, and weak oversight. This study recommends enhancing human resource capacity, encouraging active community participation, and strengthening the supervision system in village fund management.

Keywords: Village Fund, Policy, Community Participation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap masyarakat lokal di Desa Garing, Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga penerima manfaat program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan dana desa telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi, meskipun pelibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dana desa berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterlambatan pencairan dana, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta lemahnya pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelibatan masyarakat secara aktif, serta penguatan sistem pengawasan dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Kebijakan, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Secara umum, desa dapat dipahami sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki nilai, adat, dan budaya yang khas serta mandiri dalam mengelola sumber dayanya. Desa menjadi pusat aktivitas sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro. Namun, sering kali desa-desa di Indonesia menghadapi masalah keterbatasan sumber daya, baik infrastruktur maupun ekonomi, sehingga menghambat kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan wewenang untuk mengelola pemerintahan dan kepentingan warganya dengan berlandaskan hak asal-usul serta adat istiadat lokal. Aturan ini menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk memanfaatkan potensi wilayahnya secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang partisipatif dan transparan. Dengan wewenang tersebut, desa diharapkan dapat menjadi penggerak utama pembangunan lokal, yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup warga desa.

Dana desa merupakan bentuk dukungan nyata dari pemerintah pusat kepada desa-desa di seluruh Indonesia sebagai implementasi dari Undang-Undang Desa. Dana ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan langsung ke pemerintah desa. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sejak kebijakan ini diterapkan, dana desa telah menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kebijakan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola anggaran pembangunan secara mandiri. Dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disalurkan langsung ke rekening pemerintah desa dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta

peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejak diberlakukan, kebijakan ini telah membawa perubahan signifikan di banyak desa di Indonesia.

Pengelolaan dana desa memiliki dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat lokal, terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya dana desa, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya menjadi lebih mudah dilaksanakan. Hal ini memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, serta memperbaiki mobilitas ekonomi lokal. Namun, meskipun kebijakan dana desa telah membawa banyak manfaat, tantangan dalam pengelolaannya masih sering terjadi. Beberapa masalah yang sering muncul termasuk rendahnya kapasitas aparat desa dalam mengelola anggaran, kurangnya transparansi, serta masalah pengawasan yang lemah. Penyelewengan dana desa juga menjadi isu serius di beberapa wilayah, yang dapat menghambat keberhasilan program pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelolaan dana desa serta peningkatan pengawasan dari masyarakat dan pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan dana desa dapat digunakan secara efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

Desa Garing adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan karakteristik khas pedesaan yang masih kental dengan nilai-nilai tradisi dan kebersamaan masyarakatnya. Masyarakat Desa Garing sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian utama. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, desa ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan publik.

Pengelolaan dana desa telah menjadi kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong pembangunan desa secara mandiri. Namun, meskipun dana desa terus meningkat setiap tahun, banyak desa di Indonesia yang belum menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Di Desa Garing, Kabupaten Gowa, potensi sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki desa dengan hasil yang dicapai melalui pengelolaan dana desa.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Fadilah dan Biduri (2024), menemukan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di beberapa wilayah. Namun, penelitian oleh Halim dan Taryani (2023) menunjukkan bahwa penyaluran dana desa tidak selalu berpengaruh terhadap indeks pembangunan desa, terutama di daerah dengan keterbatasan pengelolaan kapasitas sumber daya manusia. Desa Garing, meskipun menerima dana desa, menghadapi kendala seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, transparansi yang kurang optimal, serta keterbatasan partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dana desa dengan implementasinya di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Garing dan dampak yang ditimbulkan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, yang masih jarang dibahas dalam konteks lokal di Kabupaten Gowa. Sehingga, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Kasus Desa Garing Kabupaten Gowa)**".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam kebijakan pengelolaan dana desa dan dampaknya. Lokasi penelitian adalah Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi ini dilakukan secara purposive karena desa tersebut memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Jenis dan Sumber Data: Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan penggunaan dana desa, APBDes, notulen musyawarah desa, dan data profil desa.

Teknik Pengumpulan Data:

1. Wawancara semi-terstruktur: Dilakukan untuk menggali informasi terkait implementasi kebijakan dan dampaknya.

2. Observasi partisipatif: Mengamati langsung penggunaan dana desa di lapangan, terutama dalam proyek pembangunan fisik dan program pemberdayaan.
3. Studi dokumentasi: Menelaah dokumen resmi yang mendukung data hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode, membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh temuan yang kredibel dan objektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa di Desa Garing mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Musyawarah Desa (Musdes) menjadi forum utama dalam penetapan prioritas program. Beberapa program yang direncanakan meliputi pembangunan infrastruktur jalan desa, pengadaan air bersih, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, dan program bantuan sosial. Namun, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan masih terbatas, umumnya didominasi oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa. Dalam tahap pelaksanaan, keterbukaan informasi keuangan desa telah mulai diterapkan melalui papan informasi desa dan laporan tahunan, meskipun belum semua warga memahami secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, disampaikan bahwa musyawarah desa telah dilaksanakan secara terbuka, namun masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya aktif menyuarakan aspirasinya. Perangkat desa menambahkan bahwa laporan penggunaan dana desa telah dipublikasikan melalui papan informasi, meskipun kesadaran masyarakat untuk mengakses informasi tersebut masih rendah.

2. Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Masyarakat

a. Pembangunan Infrastruktur

Dana desa digunakan untuk membangun jalan desa sepanjang 8 km, memperbaiki irigasi pertanian, serta membangun fasilitas umum seperti posyandu dan balai pertemuan. Peningkatan infrastruktur ini memudahkan aksesibilitas dan mobilitas warga, serta mendukung

produktivitas ekonomi lokal. Selain itu, infrastruktur dasar seperti drainase dan jembatan kecil juga dibangun untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan konektivitas antar dusun. Dari hasil wawancara dengan warga, sebagian besar menyatakan bahwa keberadaan infrastruktur baru sangat membantu meningkatkan kegiatan ekonomi mereka, khususnya dalam memasarkan hasil pertanian.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Melalui program pemberdayaan ekonomi, desa mengadakan pelatihan keterampilan seperti pertanian modern, peternakan, dan pembuatan kerajinan tangan. Selain itu, diberikan bantuan modal usaha kecil kepada kelompok masyarakat, seperti kelompok tani dan usaha mikro, sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Namun, dari wawancara dengan penerima manfaat program pemberdayaan, diketahui bahwa beberapa warga mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha karena kurangnya pendampingan lanjutan setelah menerima bantuan modal.

c. Peningkatan Layanan Sosial:

Dana desa juga mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, seperti renovasi sekolah dasar, pengadaan alat kesehatan di posyandu, serta program sanitasi desa. Upaya ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Garing secara keseluruhan. Program sanitasi desa yang meliputi pembangunan toilet umum dan penyediaan air bersih berhasil menurunkan angka penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan ISPA. Sebagian warga menyampaikan bahwa kualitas layanan posyandu membaik setelah adanya perbaikan fasilitas dan pengadaan alat kesehatan baru. Namun, manfaat program-program ini belum merata dirasakan oleh semua warga, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, yang disebabkan oleh keterbatasan akses transportasi dan kurangnya penyuluhan berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan warga penerima manfaat menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan bantuan modal juga meningkatkan pendapatan masyarakat meskipun masih ditemukan masalah dalam keberlanjutan usaha.

Berikut ini rekapitulasi dampak dana desa terhadap masyarakat berdasarkan sektor:

No	Sektor	Program Utama	Dampak yang Dirasakan
1	Infrastruktur	Pembangunan jalan, irigasi, balai desa	Meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas ekonomi
2	Ekonomi	Pelatihan keterampilan, bantuan modal	Meningkatkan pendapatan, muncul usaha baru
3	Sosial dan Kesehatan	Renovasi sekolah, fasilitas posyandu	Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan
4	Sanitasi dan Lingkungan	Toilet umum, pengadaan air bersih	Penurunan angka penyakit berbasis lingkungan

Sumber: Hasil wawancara dan observasi lapangan, 2024

3. Kendala dalam Implementasi

a. Keterlambatan Pencairan Dana

Proses administrasi pencairan dana dari pemerintah pusat seringkali terlambat, sehingga menghambat pelaksanaan program. Kondisi ini mempengaruhi penyusunan jadwal kegiatan pembangunan fisik yang bergantung pada musim hujan.

b. Rendahnya Kapasitas Aparatur Desa

Sebagian besar aparat desa belum memiliki kompetensi yang memadai dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan dana. Pelatihan yang diadakan pemerintah daerah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan teknis pengelolaan program berbasis hasil.

c. Lemahnya Pengawasan

Pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan eksternal dari pihak kabupaten dinilai belum optimal. Rendahnya pengawasan membuka peluang terjadinya ketidaktepatan penggunaan dana. Selain itu, tidak adanya laporan evaluasi program secara berkala menurunkan efektivitas pengawasan partisipatif masyarakat.

d. Partisipasi Masyarakat yang Rendah

Walaupun terdapat forum musyawarah, tingkat keikutsertaan masyarakat biasa masih rendah. Banyak warga merasa kurang memahami mekanisme penggunaan dana desa dan

menganggap pengelolaan dana adalah urusan pemerintah desa semata. Minimnya sosialisasi dan transparansi berbasis teknologi informasi memperburuk tingkat literasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dana desa di Desa Garing memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan sosial masyarakat. Namun, distribusi manfaat belum optimal dan masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya, seperti keterlambatan pencairan, rendahnya kapasitas aparatur desa, dan lemahnya pengawasan. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, pelibatan aktif masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan perlu menjadi prioritas untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar, A., & Agustang, A. (2020). Dampak Sosial Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. *Jurnal Sosialisasi*, 7(2), 19–25.
- Fadilah, E. N., & Biduri, S. (2024). Pengaruh Dana Desa dan Kebijakan terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Tinjauan Singkat. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(2), 10–21070.
- Firmansyah, D., Susetyo, D. P., & Sumira, M. (2020). Dampak dana desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 3(2), 168–181.
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Indeks Desa Membangun di Nusa Tenggara Timur. [Artikel jurnal].
- Permatasari, M., Widodo, A., & Sari, D. P. (2021). Peran Dana Desa terhadap Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Kesadaran Partisipatif Masyarakat. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

- Setiawan, B., Yani, A., & Suryanto, T. (2023). Optimalisasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Berkelanjutan. *Journal of Rural Development Studies*, 5(1), 12–25.
- Yani, A. (2023). Manajemen Penggunaan Dana Desa dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 14(2), 75–88.
- Yuliawati, S., & Herlina, R. (2020). Penguatan Kelembagaan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 6(1), 22–34